

MENGGAGAS PENDIDIKAN KARAKTER RESPONSIF GENDER

Sofyan Hadi

Pesantren Entrepreneuner Al-Mawaddah Kudus,
Jawa Tengah, Indonesia
sofyan.hadi@gmail.com

ABSTRAK

Baru-baru ini muncul fenomena krisis karakter bangsa yang menyebabkan krisis nasional dalam berbagai dimensi. Berbagai aspek kehidupan juga bertanggung jawab atas rapuhnya kepribadian bangsa ini. Termasuk sekolah sebagai lembaga yang secara esensial sebagai media pembangun karakter. Pendidikan meminjam istilah dari Shapiro (2006) sudah kehilangan hati, karena dimensi moral dan spiritual telah terpinggirkan. Jadi jika momentum “Hari Pendidikan” (2 Mei 2010), pemerintah menyatakan “gerakan nasional di negara pendidikan karakter,” maka perlu diterima dengan baik, meskipun masih dalam pencarian model. Tulisan singkat ini mencoba untuk meninjau bagaimana esensi dari pendidikan karakter dan desain kurikulum seperti itu harus disiapkan dalam perspektif keadilan gender. Makalah ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter berbeda dengan pendidikan moral. Jika pendidikan moral cenderung mengajarkan dimensi etika, baik dan buruk di tingkat kognitif, maka pendidikan karakter memerlukan pendekatan holistik. pendidikan karakter sebagai dikonfirmasi (Lickona, 1991) harus mencakup tiga aspek mengetahui, merasakan dan bertindak dari kebaikan.

Oleh karena itu, dalam merancang kurikulum perlu mempertimbangkan tiga-lingkungan yang didukung oleh upaya intervensi dan habituasi, mulai dari kelas, sekolah, dan lingkungan keluarga. Agar pembangunan kurikulum tidak bias gender, perlu mengedepankan perspektif gender dalam mengembangkan kurikulum pendidikan karakter di semua tingkat.

Kata kunci: pendidikan karakter, keadilan gender, pengembangan kurikulum

ABSTRACT

Problems of character education already started sticking in various aspects of life involving men and women. Efforts are needed breakthrough in the design of character educational that can transform the moral values into action and real personality with gender responsive. This brief paper tries to review how the essence of character education and curriculum design as it should be prepared in the perspective of gender justice. This paper concludes that character education is different from the of moral education. If moral education tends to teach the ethical dimensions, good and bad in cognitive level, then character education requires a holistic approach. Character education should include three aspects of knowing, feeling and acting of the good. Therefore, in designing the curriculum needs to consider the three-sphere which is supported by intervention efforts and habituation, starting at the class, school, and family environment. In order for the construction of curricula is not gender-biased, the need to put forward a gender perspective in developing a character education curriculum especially in Islamic education in all level in Indonesia.

Keywords: character education, gender, curriculum development

A. Pendahuluan

Dalam perspektif makro tren pendidikan akhir-akhir ini banyak bangsa di penjuru dunia termasuk Indonesia

cenderung berkiblat pada Barat terutama Amerika Serikat (AS) dalam mengembangkan sistem pendidikan (Buchori, 2007; Rahmat, 2010). Yang mengejutkan ternyata pendidikan di AS yang banyak menjadi referensi pengembangan pendidikan di berbagai belahan dunia justru mengalami persoalan mendasar.

Baru-baru ini Shapiro (2006) dalam buku *Losing heart. The Moral and Spiritual Miseducation of American Children* menggambarkan pendidikan Amerika telah kehilangan hati, yaitu pendidikan yang terasing dari dimensi moral dan spiritual. Sekolah-sekolah cenderung mengejar target skor tes dan kering makna. Sekolah kemudian mirip pabrik yang memproduksi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (kapitalisme) belaka, dengan menyiapkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan pasar yang begitu kompetitif. Siswa terkondisikan menghadapi orang lain sebagai kompetitor yang saling mengalahkan berebut ranking dan persaingan memperoleh lapangan kerja.

Dampaknya sekolah-sekolah lalu hanya menjadi sekumpulan komunitas terpelajar namun tertutup oleh makna (*closed community of meaning*). Dalam hal ini sekolah-sekolah sudah menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan (Shapiro, 2006). Orientasi pendidikan yang seperti ini menurut Tabb (2001) tak lepas dari ideologi pendidikan neo-liberal yang memiliki 3 (tiga) ciri yaitu; (1) penyediaan biaya pendidikan yang efisien melalui modifikasi produk untuk meraih keuntungan; (2) pengujian hasil belajar dengan standarisasi pengalaman melalui tes pilihan ganda; (3) memfokuskan pada keterampilan yang laku di pasar (*marketable skills*).

Padahal menurut Ki Hadjar Dewantara (1962) pendidikan seharusnya memajukan bertumbuhnya watak(karakter), kekuatan batin, pikiran dan tubuh anak telah tereduksi menjadi sekedar memenuhi kebutuhan pasar kerja yang cenderung materialistik. Pengembangan karakter yang

seharusnya menjadi hal esensial dalam praktek pendidikan telah tergeser oleh kepentingan kapitalisme, sehingga pengetahuan, keterampilan dan keberlangsungan pendidikan di orientasi untuk memperoleh sebanyak mungkin keuntungan secara ekonomi.

Gejala seperti di atas di dukung dengan semakin menguatnya paradoks sosial yang menunjukkan seakan bangsa ini sudah kehilangan identitas diri sebagai bangsa yang berkarakter. Banyak koruptor justru muncul dari kalangan terdidik, plagiator marak mulai dari mahasiswa hingga guru besar (The Jakarta Post, 12/11/2009; Kompas, 10/2/2010; Mujahidah, 2010). Banyak pelajar tawuran justru pada jam-jam yang semestinya mereka belajar (Assegaf, 2002).

Sementara dalam konteks ranah relasi gender perilaku yang menunjukkan menjadikan perempuan sebagai korban dalam berbagai bentuknya juga semakin hari semakin meningkat. Mulai dari tak dipedulikannya hak-hak reproduksi perempuan dalam pengungsian baik karena korban bencana atau konflik sosial, isu Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang menjadi korban majikan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sejenisnya (Ratnasari, 2009; Said, 2005; Sumbulah, 2008) menunjukkan bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis identitas dan krisis harga diri manusia Indonesia. Krisis identitas ditandai dengan hilangnya kepercayaan diri antara lain terlihat dalam merosotnya mutu warga bangsa sehingga tidak bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain (St. Sularto, 2009: 119-121). Lebih jauh menurut Buchori (2007; 2010) adanya berbagai krisis yang ada seperti itu, tak lepas dari sumber utama yang tak lain adalah krisis karakter bangsa.

Karena itu semua pihak terutama para praktisi pendidikan mulai dari guru, kepala sekolah, pengembang kurikulum hingga tenaga kependidikan di semua jenjang perlu mengembalikan ruh pendidikan yang mulai sirna tersebut.

Persoalannya kemudian meskipun pendidikan karakter bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sebagaimana ditekankan oleh Martin Buber sebagaimana dikutip oleh Rahmat (2010) bahwa “*education worthy of the name is essentially is education of character*”. Dengan kata lain pendidikan digagas tak lain untuk pengembangan karakter peserta didik. Karena itu apabila dalam kenyataannya pendidikan justru sekedar membekali kompetensi yang berbasis keterampilan yang dibutuhkan industri belaka, tanpa membekali dengan nilai-nilai terinternalisasi dalam kepribadian peserta didik, maka pendidikan telah mengalami disorientasi.

Untuk merespons berbagai persoalan di atas, maka paper ini akan mencoba membahas tiga hal; (1) Ulasan tentang geneologi hakikat pendidikan karakter; (2) Dimensi ontologis pendidikan karakter; (3) Uraian tentang pengembangan kurikulum pendidikan karakter; (4) Gagasan pendidikan karakter sensitif gender.

B. Pembahasan

1. Genealogi Pendidikan Karakter

Untuk melacak cikal bakal pendidikan karakter secara geneologis hingga menjadi masuk dalam ranah sistem pendidikan memang tidaklah mudah. Namun kajian akademik yang cukup komprehensif tentang hal ini cukup menarik mencermati ulasan Doni Koesuma A (2007) dalam buku terbarunya *Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Menurutnya pendidikan karakter pertama kali dicetuskan oleh pedagog Jerman F.W.Foerster (1869-1966) yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi. Pendidikan karakter muncul sebagai reaksi atas kejumudan pedagogi *natural Rousseauian* dan instrumentalisme pedagogis deweyan dan pedagogi *puerocentris* lewat perayaan atas spontanitas anak-anak (Edouard Claparède, Ovide Decroly, Maria Montessori) yang

mewarnai pedagogi di Eropa dan Amerika Serikat di awal abad 19 yang mulai dirasakan semakin tidak mencukupi lagi bagi sebuah formasi intelektual dan kultural seorang pribadi (Koesoerna, 2007: 9-44).

Pada saat itu mulai muncul polemik anti-positivis dan anti-naturalis dalam konteks pendidikan yang berkembang di Eropa sebagai bagian dari gerakan pembebasan dari determinisme natural menuju dimensi spiritual, bergerak dari formasi personal yang lebih didominasi pendekatan psikologis-sosial menuju sebuah cita-cita humanisme yang kental dengan dimensi kultural dan religius. Karena itu lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang diterjang gelombang positivisme yang dipelopori oleh filsuf Prancis Auguste Comte (Koesoema, 2007: 9-44).

Tujuan pendidikan, menurut Foerster sebagaimana dikutip Koesoema (2007) adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara si subyek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi, yang memberikan kesatuan dan kekuatan atas keputusan diambilnya. Karena itu, karakter menjadi semacam identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari kematangan karakter inilah kualitas seorang pribadi diukur.

Namun kalau mencermati kehadiran Islam yang secara normatif menegaskan dalam risalah kenabian bahwa "*innamabuitstu liutammima makarima al akhlaq*" (sesungguhnya saya [Nabi Muhammad saw] diutus oleh Allah swt. tak lain untuk menyempurnakan akhlak, hal ini menunjukkan bahwa sejak kehadirannya, Islam yang dibawa melalui Nabi Muhammad Saw. mengemban misi utama untuk membangun karakter. Akhlak dalam bahasa Arab semakna dengan dengan karakter (*character*) dalam bahasa Inggris.

Yang membedakan hanyalah pada sumber nilainya saja. Kalau akhlak lebih berorientasi pada nilai-nilai Islam, sementara dalam "karakter" lebih bermakna universal termasuknya di dalamnya karakter yang didasari pada nilai-nilai spiritualitas Islam (Saebani & Hamid, 2010; Lickona, 1991). Dengan demikian pendidikan karakter dalam Islam hadir sejak keberadaan Islam itu sendiri atau sejak diutusnya Rasulullah Saw. pada abad ke-VII Masehi.

Karena itu Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Penekanan kepada pentingnya peserta didik supaya hidup dengan nilai-nilai kebaikan, spiritual dan moralitas dalam pendidikan Islam tidak bisa diabaikan. Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diamanatkan sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi (Muhaimin, 2008: 36-37). Sementara manusia dewasa yang baik secara akal, mental maupun moral tentu akan menjalankan fungsi kemanusiaan yang diamanatkan sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Manusia yang bisa menjalankan antara apa yang dipahami sebagai baik dan meninggalkan apa yang dipahami sebagai buruk adalah bagian dari ciri-ciri manusia yang berakhlak (berkarakter).

Demikian juga dalam konteks keindonesiaan Bapak pendidikan nasional kita Ki Hadjar Dewantara (1962) sejak awal menegaskan bahwa pendidikan perlu mengondisikan tumbuhnya watak (karakter) di samping kekuatan batin, pikiran dan tubuh. Pendidikan menuntut adanya olah pikir (*head*), olah rasa (*heart*) dan olah raga yang mendukung keterampilan hidup (*hand*). Dalam upaya penguatan karakter peserta didik inilah maka Dewantara dengan cerdas merumuskan formulanya

yang dikenal dalam rumusan; “*Ing ngarso sun tulodo, ing madya mrmngun karso, tut wuri hrmdayani*” (di depan menjadi teladan, di tengah mengembangkan karsa, membimbing dari belakang). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep menghantarkan peserta didik dalam mengembangkan diri dan kepribadiannya begitu menonjol terfokus dalam tujuan pendidikan. Karena itu menurut Hasan (2005) orientasi pendidikan perlu diarahkan untuk memenuhi karakter dan kemampuan dalam kehidupan pada situasi zamannya.

Konsep sebagaimana dilontarkan Ki Hajar Dewantara tersebut menurut Hasan (2008: 176) justru telah menerapkan dari pandangan filosofis “rekonstruksi sosial” yang banyak dibahas dalam dunia pendidikan pada masa kini. Namun sayangnya seiring dalam perjalanan sejarah pendidikan Indonesia memperlihatkan bahwa setelah UU nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1954, konsep seperti itu tidak lagi menjadi suatu landasan kuat pendidikan pada masa berikutnya karena kepentingan ilmu menduduki posisi yang lebih penting daripada pengembangan karakter.

Pendidikan lalu kemudian sekedar menyiapkan para peserta didik untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi, atau hanya untuk mereka yang memang mempunyai bakat pada potensi akademik (ukuran IQ tinggi). Hal ini terlihat dari bobot mata pelajaran yang diarahkan kepada pengembangan dimensi akademik peserta didik saja, yang sering diukur dengan kemampuan logika-matematika dan abstraksi (kemampuan bahasa, menghafal, abstraksi – atau ukuran IQ). Padahal ada banyak potensi lainnya yang perlu dikembangkan, karena berdasarkan teori Howard Gardner (1983) tentang kecerdasan majemuk, potensi akademik hanyalah sebagian saja dari potensi-potensi lainnya.

Kesadaran paradigmatis mengenai pendidikan yang mampu mengonstruksi karakter peserta didik dalam hal ini bisa dijadikan sebagai ide kurikulum. Pendidikan karakter

hanya menjadi wacana belaka kalau tidak dibarengi dengan pengembangan kurikulum pada tataran sebagai dokumen, implementasi dan juga sebagai hasil.

2. Dimensi ontologis Pendidikan Karakter

Secara istilah, karakter sebagaimana dinyatakan oleh Lickona (1991, 51) bahwa, “Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior. . . habits of the mind, habits of the heart, and habits of action”. Dengan kata lain karakter akan terkait dengan mengerti tentang kebaikan, mencintai kebaikan dan melakukan kebaikan. Mengerti kebaikan tidak melulu dalam arti pengertian kognitif. Tetapi di dalamnya juga terkait dengan pengertian praktis, pengertian yang terkait dengan tindakan. Karenanya karakter akan muncul pada situasi kritis. Ada kemungkinan untuk memilih, atas berbagai pilihan yang mungkin ada, dan apa yang dilakukannya. Dan ini dapat terjadi di dalam situasi-situasi kritis.

Salah satu tolok ukur menguji karakter menurut Budi Subanar (2010) dapat dilihat dari tindakan yang diambil seseorang dalam situasi kritis. Itulah sebabnya di dalam mengerti kebaikan juga terkait dengan pengertian praktis. Ini berarti tidak melulu mengerti, tapi juga bertindak atas dasar pengertian tersebut. Hal kedua yang terkait dalam karakter (baik) adalah mencintai kebaikan. Terdorong untuk memilih untuk melakukan hal yang baik.

Kondisi seperti itu bukanlah sesuatu yang *taken for granted* (cetak biru) karena dimensi kemanusiaan tak lepas dari gejala kejiwaan dengan berbagai potensi pikir, dzikir dan ikhtiar yang hidup dalam lingkungan tertentu. Faktor internal dan eksternal harus selaras dalam membangun karakter individu atau masyarakat. Untuk kepentingan inilah dibutuhkan upaya sadar dan terencana yang mengondisikan

setiap individu terbangun karakternya melalui proses pendidikan karakter.

Kalau mengambil inspirasi seorang filsuf Jerman era modern, Immanuel Kant sebagaimana dikutip Amin Abdullah (2010) ditegaskan bahwa Pendidikan Karakter adalah pendidikan kemanusiaan yang bertujuan menjadikan manusia "baik". Menjadikan manusia "baik" tanpa prasyarat apapun. Karena itu dengan Pendidikan Karakter yang berhasil akan membuat warga masyarakat dan warga negara menjadi "baik" tanpa prasyarat apapun. Menjadikan warga negara yang "baik" tanpa embel-embel syarat agama, sosial, ekonomi, budaya, ras, politik dan hukum. Pendidikan Karakter seperti ini sejalan dengan cita-cita kemandirian manusia (*moral otonomy*) dalam bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Karakter yang sukses akan sama dengan tujuan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik dalam ranah multikultural, multietnis, multibahasa, multireligi di era globalisasi seperti saat sekarang ini.

Pendidikan karakter akan menegaskan kehidupan yang baik dengan meletakkan dimensi kemanusiaan pada level satu. Sedangkan aspek lain di luar dimensi kemanusiaan seperti pangkat, jabatan, ras, etnis, golongan, politik, ekonomi pada level dua. Karena kekuatan karakter seseorang dalam pandangan Foerster seperti dikutip oleh (Doni Koesoema, 2007) tampak dalam 4 ciri fundamental yang mesti dimiliki yakni; (1) keteraturan interior melalui mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Ini tidak berarti bahwa karakter yang terbentuk dengan baik tidak mengenal konflik, melainkan selalu merupakan sebuah kesediaan dan keterbukaan untuk mengubah dari ketidakteraturan menuju keteraturan nilai.; (2) koherensi yang memberikan keberanian melalui mana seseorang dapat mengakarkan diri teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu

sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang; (3) otonomi yakni kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan aturan dari luar sehingga menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat melalui penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan dari pihak lain; (4) keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang untuk mengingini apa yang dipandang baik, sedangkan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Penjelasan di atas persis sebagaimana juga ditegaskan oleh Ki Hadjar Dewantara dengan terminologi yang khas berakar pada budaya bangsa yang disebutnya sebagai pendidikan budi pekerti. Menurutnya (1962, 24):

"budipekerti atau watak jaitu bulatnja djiwa manusia, jang dalam bahasa asing disebut "karakter", ..sebagai djiwa jang sudah "berasas hukum kebatinan". Orang jang mempunjai ketjerdasan budipekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar jang pasti dan tetap. Itu sebabnja tiap-tiap orang itu dapat kita kenal wataknja dengan pasti..."

Karena itu Dewantara (1962) menekankan bahwa praktek pendidikan harus dibangun dengan tidak mengabaikan konsep "*Tringa*" yaitu *ngerti* (mengetahui), *ngroso* (memahami) dan *nglakoni* (melakukan). Artinya, tujuan orang hidup pada dasarnya adalah meningkatkan pengetahuannya tentang apa yang dipelajarinya, mengasah rasa untuk meningkatkan sensitivitas yang ada di sekitarnya, serta melaksanakan ajaran yang ia telah ketahui sebelumnya. Kemudian konsep *Tringa* ini berkembang menjadi konsep "*Trisakti Jiwa*" yang terdiri dari cipta, rasa dan karsa. Ini berarti untuk melaksanakan segala sesuatu maka harus ada kombinasi yang sinergis antara hasil olah pikir, hasil olah rasa, serta motivasi yang kuat di dalam dirinya. Yang kemudian konsep *Trisakti Jiwa* ini berkembang lagi menjadi konsep "*Trihayu*" yaitu, *memayu hayuning sariro*, *memayu hayuning bongso*, dan *memayu hayuning bawono*.

Maksudnya, apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya dan juga bermanfaat bagi orang lain bagi manusia secara keseluruhan (Saiful Mustofa, 2010).

Karena itu sesungguhnya akar pendidikan yang dibangun oleh para *founding fathers* hakikatnya adalah pendidikan karakter, bukan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan pasar industri minus karakter. Karena itu dalam hal ini perlu merevitalisasi pendidikan karakter yang telah ada dengan merekonstruksi kurikulum di semua jenjang pendidikan (Siskandar, 2010). Proses konstruksi dan rekonstruksi kurikulum pendidikan karakter ini mensyaratkan keterlibatan banyak pihak mulai dari lingkungan kelas, sekolah, masyarakat dan keluarga. Karena pendidikan karakter adalah proses sosial budaya yang berkelanjutan yang membutuh kesadaran budaya dan kecerdasan budaya (*cultural intelligence*).

3. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter

Dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang pada ranah kurikulum lalu melahirkan sistem kurikulum terbaru yang dikenal dengan Kurikulum 2013 (K13), maka hal ini memberi ruang yang luas bagi setiap satuan pendidikan untuk secara kreatif mengonstruksi dan mengembangkan kurikulum di setiap jenjang pendidikan.

UU Sisdiknas mendefinisikan pendidikan sebagai *"usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."* (Bab I Pasal 1).

Dengan konsep pendidikan seperti di atas, jelas memperlihatkan sejumlah pokok yang berkaitan dengan pendidikan sangat berkaitan erat dengan pembentukan karakter dengan tetap memperhatikan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Sedangkan mengenai pengembangan kurikulumnya secara penuh diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan sebagaimana sejalan dengan semangat K13.

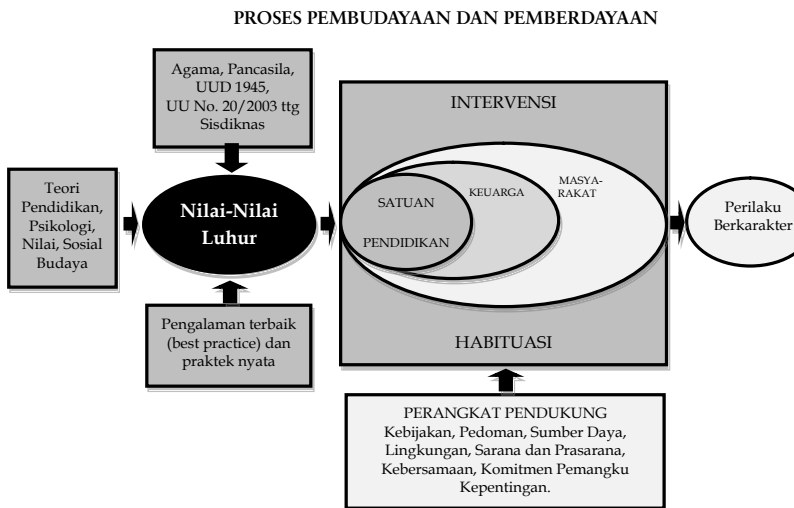
K13 yang mulai diberlakukan pada tahun 2014/2015 jelas berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa K13 merupakan produk dari penjabaran. Dua hal penting yang membedakan K13 dengan kurikulum sebelumnya adalah (a) diberlakukannya kurikulum yang berdiversifikasi, dan (b) adanya standarisasi pendidikan sebagai akibat dari heterogenitas bangsa, baik dilihat dari aspek geografisnya maupun latar belakang sosial budayanya. Heterogenitas ini membawa dampak bahwa terdapat perbedaan yang cukup bermakna antara daerah dan pusat (Kamarga, 2009).

K13 dengan demikian menjadi tantangan tersendiri bagi para guru dan pengelola pendidikan (sekolah) untuk mendesain kurikulum sesuai potensi daerahnya masing-masing, mulai dari tujuan, isi/ materi, metode, media hingga evaluasi. Karena itu inovasi selalu dibutuhkan, terutama dalam bidang kurikulum, untuk mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Sebagaimana ditegaskan oleh Rosenblum & Louis (1981:1) terkait dengan inovasi dalam pembelajaran:

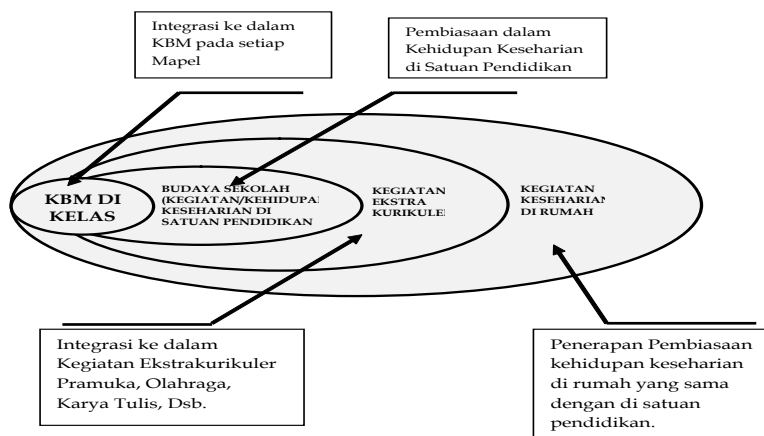
“Declining enrollments, rapid changes in the existing technology and knowledge about teaching and learning processes, a continual expansion of the role of the school into new areas, and changes in the prevailing cultural preferences of both local communities and the larger society continually impel schools to innovate.”

Dengan demikian pesatnya perubahan sosial dan perkembangan pengetahuan tentang belajar dan mengajar menuntut adanya pembaruan-pembaruan yang berbasis pada kepentingan peserta didik dan *stakeholder*. Dibarengi dengan semangat pengembangan K13, maka pembaruan (*inovasi*) dalam berbagai komponennya kurikulum mutlak diperlukan dalam bingkai menjadikan sekolah sebagai sarana pendidikan yang mampu membangun karakter bangsa.

Dalam *grand design* pendidikan karakter yang dirumuskan oleh Kemendiknas digambarkan dalam bagan sebagai berikut (Kemendiknas, 2010):



Dengan memperhatikan bagan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan karakter membutuhkan proses sosial yang dalam bingkai pendidikan dan melibatkan para pemangku kepentingan mulai di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pada tataran mikro di tingkat sekolah dapat digambarkan sebagai berikut (Kemendiknas, 2010):



Bagan mikro pendidikan karakter seperti di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter harus diselenggarakan secara holistik dan selaras antara teori (*knowing*) dan praktek (*acting*) yang dilandasi dengan perasaan cinta (*loving*). Kondisi seperti itu harus terintegrasi mulai di ruang kelas, sekolah dan keluarga sehingga menjadi *habitus* dan *etos* yang tumbuh dalam pribadi anak dalam konteks interaksi sosial dalam berbagai dimensinya.

Hal ini seperti juga ditegaskan oleh Amin Abdullah (2010) bahwa Pendidikan Karakter diawali dengan *Pengetahuan (Teori)*, *Pengetahuan (Teori)* tersebut bisa bersumber dari pengetahuan agama, sosial, budaya. Kemudian dari pengetahuan itu diharapkan dapat “membentuk Sikap atau akhlak yang mulia.” Namun yang paling penting dari rangkaian panjang ini adalah mengamalkan apa yang diketahui itu. Dengan pola seperti itu dapat dipahami bahwa model paradigma pembelajaran Pendidikan Karakter (*humanities*) semestinya tidaklah seperti pembelajaran sains (*natural sciences*) yang memang memerlukan ketajaman analisis intelektual.

Yang diperlukan dalam pembelajaran *humanities*, dalam hal ini Pendidikan Karakter menurut Abdullah (2010),

adalah kemampuan guru, dosen, pendidik, pemimpin untuk menyentuh dan menyapa keseluruhan dan keutuhan pribadi anak didik. Keutuhan pribadi manusia meliputi perasaan, rasio, imajinasi, kreativitas dan memori. Dengan begitu, paradigma Pendidikan Karakter seharusnya lebih tajam diarahkan pada kehendak dan motivasi, dan bukannya intelektualitas. Oleh karena itu, yang perlu dikenal terlebih dahulu oleh para pendidik adalah Struktur Kepribadian manusia. Sedangkan Motivasi atau Kehendak sangat terkait dengan hati nurani (Abdullah, 2010). Maka Pendidikan Karakter adalah Pendidikan Hati nurani, yang menekankan pentingnya sentuhan *rahsa* dan kalbu (*heart*).

Dimensi hati perlu mendapatkan sentuhan khusus dalam pendidikan karakter, sebagaimana sudah sering disadari dalam tradisi Islam bahwa sesungguhnya dalam jasad setiap manusia terdapat segumpal darah, yaitu hati (*'alā inna fī al-jasadi mudḡah... wa hiya al-qalbu*). Namun yang menarik menurut pemahaman Abdullah (2010), hati atau kalbu di sini bukanlah bentuk fisiknya berupa segumpal darah, melainkan adalah *Mind Set* atau seperangkat nilai-nilai yang telah membentuk perilaku. *Mind Set* inilah biasa disebut dengan filsafat hidup pribadi (*Mabda' al ḡayāh*), yang telah mendarah mendaging.

Dalam *Mind Set* atau Falsafah hidup pribadi mempunyai berbagai potensi yang seluruhnya perlu disentuh dan digerakkan, antara lain emosi, rasio, imajinasi, memori, kehendak, nafsu, dan kecenderungan-kecenderungan. Seluruh potensi rohani yang tertimbun dalam badan fisik manusia akan tampak keluar ke permukaan dalam bentuk perilaku lahiriah, baik dalam bentuk ekspresi wajah atau raut muka (senyum, sangar, cemberut, peduli, ramah), gerak-gerik (bahasa Jawa: *solah bowo*) mencurigakan (*slintutan*), tutur bicara (bahasa Jawa: *muna muni*) seperti halus, kasar, galak, manis, tingkah

laku (tegas, sopan, kasih sayang) dan juga kelalaian (lupa, tidak serius, tidak teliti).

Untuk mengondisikan peserta didik mampu menemukan falsafah hidupnya (*mind set*) yang menancap dalam hati tersebut tidak mungkin ditemukan melalui proses pembelajaran yang menekankan pada orientasi isi (*content*) belaka tetapi membutuhkan serangkaian pembelajaran yang bermakna (*meaningfull learning*). Pembelajaran yang bermakna menurut Shapiro (2006, 40-41) justru seharusnya menekankan juga dimensi isi dari kurikulum yang tersembunyi (*the content of the hidden curriculum*). Dalam prakteknya peserta didik tak sekedar belajar isi dalam materi pelajaran saja tetapi dalam proses pembelajaran guru harus mampu menghadirkan makna dalam hubungannya dengan kehidupan nyata yang konkret, misalnya makna relasi sosial dalam sekolah, pentingnya pengetahuan teknis, ekspresi estetik dan juga pentingnya empati dalam kehidupan sosial.

Karena itu peserta didik yang menemukan makna (*meaning*) dalam belajar, mereka akan terbangun rasa cinta (*feeling and loving*) dalam belajar, sehingga nilai-nilai yang mereka dapatkan akan direproduksi menjadi spirit dalam bertindak dalam kehidupan nyata tanpa paksaan dan tanpa beban sehingga menjadi karakter dalam diri mereka.

Namun persoalannya kemudian bahwa pendidikan karakter adalah cakupan yang luas, seluas kehidupan itu sendiri. Karena dalam mendesain pendidikan karakter dalam setiap satuan pendidikan perlu menentukan nilai-nilai utama yang akan menjadi unggulan dalam karakter peserta didik yang dicita-citakan. Hal ini tentu tak lepas dari cita-cita kualitas masa depan manusia seperti apa yang ingin diraih (Hasan, 2009). Hal ini juga tidak bisa diabaikan dengan konstruksi budaya serta masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat pembelajar.

Karena itu ketika pendidikan karakter dalam hal ini ingin diorientasikan pada konstruksi masyarakat yang berkeadilan gender, maka dalam pengembangan kurikulum juga perlu menggunakan perspektif gender. Untuk kepentingan inilah para pengembang kurikulum juga perlu menggunakan paradigma pengembangan kurikulum pendidikan karakter inklusi gender yang dalam prosesnya identifikasi masalah tak lepas dari analisis gender.

4. Kurikulum Pendidikan Karakter Inklusi Gender

Istilah inklusi dalam dunia pendidikan biasanya lebih menunjukkan upaya penyatuan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus (BK) ke dalam program sekolah reguler dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh (Smith, 2009). Meskipun istilah inklusi memiliki makna yang berbeda-beda, namun semangat yang ditonjolkan adalah sebagai cara baru untuk berbicara *mainstreaming* sebagai *banner* untuk menyerukan *full inclusion* atau penghapusan pendidikan khusus atau sering disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dalam kajian gender hal ini bisa kaitannya dengan pendidikan karakter inklusi gender, menunjukkan suatu upaya pendidikan karakter yang menumbuhkan kesadaran karakter yang mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan gender. Dengan kata lain keadilan gender tak sekedar menjadi wacana tetapi mampu terinternalisasi dalam kesadaran individu sehingga menjadi karakter dalam sosialitanya.

Di tengah maraknya gerakan pendidikan karakter tanpa dibarengi dengan perspektif gender, maka bukan tidak mungkin karakter bangsa yang terbangun menjadi bias gender. Karena itu perlu upaya khusus orientasi kurikulum pendidikan karakter yang adil gender. Gagasan memasukkan isu-isu gender bukanlah sesuatu yang baru, namun masih dalam proses menemukan bentuknya. Karena itu dalam

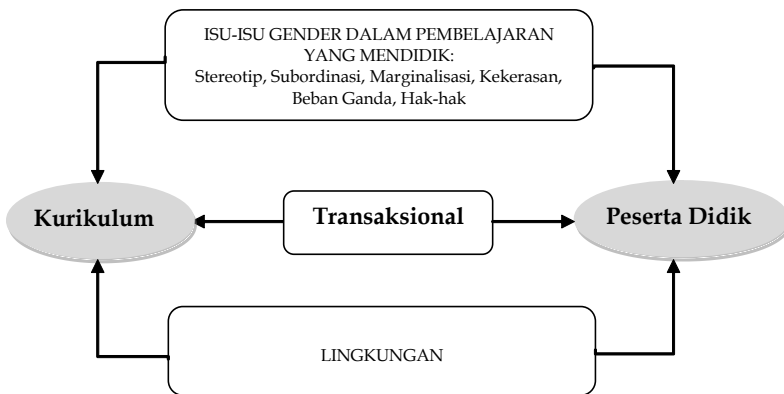
satuan pendidikan bisa dengan mengembangkan kurikulum yang dibuat berbasis gender. Bukti masuknya ide ini dalam kurikulum dapat dilihat dari adanya Kurikulum Kesetaraan Gender (KKG) dengan nilai-nilai Integritasi pada Kurikulum yang wajib dilaksanakan guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu: Persamaan hak laki-laki dan perempuan, perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, partisipasi laki-laki dan perempuan, keadilan bagi laki-laki dan perempuan, kerja sama laki-laki dan perempuan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, menghargai kemajemukan, demokrasi.

Secara historis pengembangan model integrasi kurikulum kesetaraan gender ini, dilandasi oleh Deklarasi pada Konferensi Dunia Tingkat Tinggi untuk Anak, yang tertera pada poin 7 (5) yang berbunyi "...ketidakseimbangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah harus ditiadakan". Demikian juga dalam Konferensi Dunia Tingkat Tinggi untuk Anak pada poin 39 (c) yang berbunyi: "Menghapuskan ketimpangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005; dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 (UNICEF). Sementara dalam Lampiran Inpres N0 9/2000, juga ditegaskan bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut merupakan problem mendasar dalam pendidikan.

Karena itu Kemendiknab melalui upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) melakukan pengurangan kesenjangan tersebut. Salah satu caranya dengan pengadaan kurikulum berbasis gender (Konsep Pengembangan Model Integrasi Kurikulum Kesetaraan Gender). Karena itu dalam konteks pendidikan karakter yang juga telah menjadi gerakan nasional tahun ini perlu membangun orientasi yang jelas

dalam pengembangan kurikulum agar karakter bangsa yang terbangun juga adil gender.

Menurut Sunaryo (2010) pendidikan karakter harus menyatu dalam proses pembelajaran yang mendidik, disadari guru sebagai tujuan pendidikan dan dikembangkan dalam suasana pembelajaran transaksional, bukan instruksional dan dilandasi semangat yang mendalam terhadap perkembangan peserta didik. Lebih jauh orientasi kurikulum transaksional sebagaimana dijelaskan lebih rinci oleh Seller dan Miller (1985,62-67) memosisikan pendidikan memiliki fungsi utama sebagai upaya dialog antara siswa dan kurikulum di mana siswa merekonstruksi ilmu melalui proses dialog. Karena itu individu dipandang sebagai makhluk rasional dan memiliki inteligensi untuk memecahkan masalah termasuk ketika dihadapkan pada isu-isu ketidakadilan gender. Kalau digambarkan dalam bagan sederhana relasi kurikulum dengan peserta didik berorientasi transaksional yang sensitif gender adalah sebagai berikut:



Dengan mencermati bagan di atas dapat dipahami bahwa konstruk kurikulum harus secara partisipatoris didialogkan dengan pengalaman peserta didik, lingkungan dan isu-isu aktual. Proses dialog tidak hanya untuk mencapai tujuan individual dalam konteks tujuan pendidikan nasional

yang ingin mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; juga untuk mencapai tujuan kolektif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan juga tujuan eksistensial untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Proses transaksional yang dibarengi dengan analisis gender tersebut dapat dijadikan sebagai ide kurikulum yang kemudian dikembangkan menjadi dokumen kurikulum yang menyangkut komponen-komponen tujuan, isi, metode dan evaluasi yang untuk selanjutnya sebagai pengayaan dalam menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Perlu diingat juga kurikulum pendidikan karakter inklusi gender dalam implementasinya harus diimplementasikan secara holistik tidak hanya menekankan pada satu mata pelajaran tetapi setiap mata pelajaran juga berupaya saling mendukung sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang mendidik secara sinergis, mulai di kelas, sekolah, dan juga lingkungan keluarga. Dengan perspektif seperti ini maka gerakan pendidikan karakter yang sedang dikembangkan akhir-akhir ini akan menemukan relevansinya dengan upaya pengarusutamaan gender dalam dunia pendidikan di semua jenjangnya.

C. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan digagas pada dasarnya memiliki dimensi ontologis sebagai upaya pembentukan karakter demi terwujudnya sistem sosial yang bermartabat bersendikan moral dan spiritual.

Pendidikan karakter membutuhkan proses panjang dan mensyaratkan keterlibatan semua elemen yang terlibat dalam

proses pendidikan. Karena itu dibutuhkan kesadaran budaya dan kecerdasan budaya sehingga nilai-nilai yang ditanamkan menjadi habitus dan etos.

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter yang berkeadilan gender menuntut adanya proses transaksional (dialog) antara kurikulum sebagai ide, konstruk dan implementasi dengan peserta didik dalam lingkungannya secara berkesinambungan dibarengi dengan perspektif dan analisis gender untuk diaktualisasikan melalui komponen-komponen kurikulum mulai dari tujuan, isi, metode dan evaluasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., 2010, "Pendidikan Karakter: Mengasah Kepekaan Hati Nurani", *Makalah Sarasehan Nasional Pendidikan Karakter*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Hotel Santika, Yogyakarta, 15 April 2010.
- Assegaf, A.R., 2002, *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assegaf, A.R. et. all., 2002, *Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan*. [Online]. Tersedia: <http://www.ditperta.net/ist1'qro/ist02-03.asp> (19 Mei 2014).
- Basuki, 2006, "Mengonstruksi Pendidikan Kritis-Humanis dan Populis, Tinjauan tentang Politik Pendidikan Indonesia Era Globalisasi", dalam *Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan, EDUKASI*. 4, (2), 38-53.
- Bramelcl, T., 1995, *Philosophies in Education in Cultural Perspectives*, Toronto: London, Holt Rinehat.
- Buchori, M., 2010, "Guru Profesional dan Plagiarisme", *KOMPAS* (22 Februari 2010).
- Buchori, M., 2010, "Krisis Moral dan Masalah Karakter", *KOMPAS* (9 Februari 2010).
- Buchori, M., 1994, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan*, Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.
- Buchori, M., 2007, *Evolusi Pendidikan di Indonesia; dari Kweekschool Sampai ke IKIP; 1852-1998*. Yogyakarta: INSIST Press.

- Damanik, 2010, "Epidemi Plagiarisme", dalam *KOMPAS* (19 Februari 2010).
- Dewantara, K.H., 1962, *Karja Ki Hadjar Dewantara*, Yogyakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Gardner, H., 1983, *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*, New York: Basic Books.
- Hasan, S. H., 2005, *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950-2005)*. dalam www.geocities.com/konferensinasionalsejarah/s_hamid_hasan.pdf [akses 1 Juli 2009]
- Hasan, S.H., 2009, "Kurikulum, Standar Kompetensi Lulusan dan Ujian Nasional", dalam *Sejarah Sebuah Penilaian, Refleksi 70 tahun Prof. Dr. H. Asmawi Zaenul, M.Ed*, Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Hasan, S.H., 2009, "Evaluasi Pengembangan K13: Suatu Kajian Konseptual", dalam *Jurnal Inovasi Kurikulum*, Februari 2009, Thn. 5. Vol 1 Nomor 6.
- Hursh, D., tt., *Neo-liberalism, Markets and Accountability: Transforming Education and Undermining Democracy In The United States and England*, [Online], Tersedia: http://www.wwwords.co.uk/pdf/validate.asp?j=pfie&vol=3&issue=1&year=2005&article=2_Hursh_PFIE_3_1_web (5 Mei 2010)
- Kamarga, H., 2009, *Inovasi Pendidikan dan Upaya Percepatan Pembangunan Bangsa*, [Online] diakses <http://hankey.pbworks.com/Inovasi-Pendidikan>, diakses pada: 2Nopember 2009.
- Kamarga, H., "Inovasi Pendidikan dan Upaya Percepatan Pembangunan Bangsa" [Online] di <http://hankey.pbworks.com/Inovasi-Pendidikan>, diakses pada: 1 September 2009.

- Kartadinata, S., 2010, Mencari Bentuk Pendidikan Karakter Bangsa [Online]. Tersedia: <http://file.upi.edu/Direktori/A%20—%20FIP/JUR.%20PSIKOLOGI%20PEND%20DAN%20BIMBINGAN/195003211974121%20-%20SUNARYO%20KARTADINATA/MENCARI%20BENTUK%20PENDIDIKAN%20KARAKTER%20BANGSA.pdf> [online] 1 September2009].
- Koesoema A, D., 2007, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, Jakarta. Grasindo.
- Koesoema A, D., 2007, Pendidikan Karakter, [Online]. Tersedia <http://albertd0ni.blogspot.com/2007/09/pendidikan-karakter-doni-koesoema.html>. Diakses pada: 2 Mei 2010.
- Lickona, T., 1991, Educating for Character, How Our School can Teach Respect and Responsibility, New York: Bantam Books.
- Miller, J.P. & Seller, W., 1985, Curriculum Perspectives and Practice, New York & London: Longman.
- Mujahidah, 2009, "Praktek Menyontek; Tradisi Klasik dalam Dunia Pendidikan", dalam Jurnal Kependidikan Ar-Riwayah. 2,(2), 45-58.
- Mustofa, S., 2010, Pemimpin Mati Rasa: Sebuah Kado di Hari Kebangkitan Nasional. [Online]. Tersedia <http://saifulmustofauinblogspot.com/c>. Diakses pada: 8 Juni 2010.
- Newman, I. and Carolyn R. B., 1998, Qual-Quan Research Methodology; Exploring the Interactive Continuum, Jakarta: SIU Press.
- Patton, A., tt., Self-Evaluation dalam Konteks Perencanaan Strategis. [Online]. Tersedia: <http://www.akademik>.

- unsri.ac.id/download/journal/files/brapub/7Self-evaluation%20dalam%20Konteks%20Perencanaan%20Strategis-ADRI.pdf. Diakses pada: Januari 2010.
- Rahmat, J., 2010, “Membangun Karakter: Mengembalikan Jiwa Pendidikan”, Makalah Pembekalan Guru, di SMU Plus Muthohhari Bandung.
- Rosenblum, S. & Louis, K. S., 1981, *Stability and Change, Innovation in an Educational Context*. New York & London: Plenum Press.
- Said, N., 2005, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Shapiro, H.S., 2006, *Losing Heart: The Moral and Spiritual Miseducation of America’s Children*. London: Lewrence Erlbaum Associates.
- Smith, J.D., 1998, *Inclusion, School for All Student*, Wadsworth Publishing Company.
- Subanar, B., 2010, ”Mendidik: Membentuk Pribadi Yang Berkarakter. Tantangan Pendidikan di Era Informasi dan Komunikasi, Makalah disampaikan pada acara Sarasehan Nasional Pendidikan Karakter, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Hotel Santika, Yogyakarta, 15 April 2010.
- Subkhan, E., 2009, “The Polarization of the Post-New Order Indonesian Education Ideologies”. Makalah dipresentasikan pada Internasional Seminar on: (Re)Considering Contemporary Indonesia: Striving for Democracy, Sustainability, and Prosperity, A Multidisciplinary Perspective. Diselenggarakan oleh Academy Professorship Indonesia in Social Sciences & Humanities, The Graduate School , Gadjah Mada University, in Yogyakarta, 2-3rd December 2009.

- Sularto, St., 2009, "Krisis Identitas dan Harga Diri". Dalam Negara Minus Nurani; Esai—esai Kritis Kebijakan Publik, Indratno, A.F.T. (ed.), Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumbulah, U., dkk., 2008, Spektrum Gender; Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi. Malang: UIN Malang Press.
- Tabb, W., 2001, Essay: Globalization And Education As A Commodity [Online]. Tersedia: <http://www.psc-cuny.org/jcglobalizaljonhtm>. Diakses pada: 5 Mei 2010.
- The Jakarta Post, 2010, "Plagiarism", [Online]. Tersedia di <http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/04/plagiarism.html>. Diakses pada: 2 Mei 2010.
- Kompas, 2002, "Pendidikan Karakter Mendesak; Penjiplakan, Dampak dari Politisasi Pendidikan" [Online]. Tersedia di <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/20/04191432/>. Pendidikan.karakter.Mendesak. Diakses pada: 20 Februari 2010.
- Kompas, 2010, "Survei, 62,7 Persen Remaja Indonesia Pernah ML", Laporan wartawan KOMPAS, Diakses pada: 9 Mei 2010.
- UNESCO, tt., "The World Conference on Early Childhood Care and Education (ECCE): Building the Wealth of Nations" [Online]. Tersedia di <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001873/187376e.pdf>. Diakses pada: 8 Juni 2010.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan